

# UNTAET Harus Menyediakan Fasilitas

Para wakil rakyat di Majelis Konstituante memerlukan buku dan fasilitas lain. Bagaimana pendapat dari masyarakat?

• • •

Untuk menyusun konstitusi, para wakil rakyat di Majelis Konstituante harus membaca banyak hal. Demikian kata Zelia Maria Silva (31 tahun) kepada **Nug Kaca-sungkana** dari *Cidadaun*. “Mereka harus membaca konstitusi dari negara-negara lain dan membaca banyak referensi lain. Tetapi bagaimana sekarang ini tidak ada bahan-bahan seperti itu? Kita memang bisa menyusun konstitusi dari pengalaman, tetapi tidak cukup. Harus ada buku-buku sumber,” lanjut guru hak asasi manusia pada SMA 2 Baucau ini. Menurutnya, waktu kerja yang hanya 90 hari tidak akan memungkinkan para wakil rakyat untuk mencari-cari bahan bacaan. “UNTAET harus menyediakan bahan referensi untuk mereka,” usulnya.

Mengenai para anggota Majelis yang berasal dari luar kota Dili, lulusan STKIP Widya Yuana, Madiun (Jawa Timur) ini mengatakan, “Tidak ada keluarga di Dili adalah suatu masalah.

Mereka harus mencari-cari tempat tinggal pada orang lain. Padahal mereka ke Dili untuk menyusun konstitusi. Mereka harus diberi fasilitas yang memadai untuk keperluan itu.”

Hal senada dikemukakan oleh José da Cruz, Koordinator Klinik Mater Dolorosa, Santa Cruz, Maliana. Menurutnya, untuk para wakil rakyat harus disediakan buku-buku paling tidak dalam bahasa Tetum dan Indonesia. “Jangan hanya mengandalkan pengalaman individu yang didapat di dalam negeri, kita juga perlu pengalaman dari negara lain. Konstitusi juga harus sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional,” kata penduduk Raifun, Maliana ini kepada **José Marçal**.

Menanggapi kesulitan yang dihadapi para anggota Majelis Konstituante dari distrik, ia mengusulkan agar UNTAET memberikan penginapan khusus kepada mereka. “Kalau ini tidak diperhatikan dapat mengganggu kerja mereka. Atau barangkali aspirasi yang diba-



FX. SUMARYONO

Zelia Maria Silva: “Harus ada buku-buku sumber.”

• • •

wa dari distrik dilupakan oleh mereka? Ini cukup berbahaya bagi proses penyusunan konstitusi. Sekarang ini ada desas-desus bahwa sejumlah wakil distrik akan mengundurkan diri,” tambahnya.

“Wakil rakyat yang datang dari distrik dan mengalami berbagai kesulitan di Dili, hal ini dapat dimengerti. Akan tetapi mereka ini mencalonkan diri yang kemudian dipilih oleh rakyat untuk menjalankan tugas mulia, harus sadar dengan kondisi Timor Lorosae saat ini,” kata Domingos da Costa, pegawai perusahaan PAE di Heli Port, Dili. Menurutnya, saat ini pemerintah tidak mempunyai uang. Karena itu kita tidak da-

pat memaksa pemerintah untuk menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan para wakil rakyat selama di Dili.

Mengenai buku-buku yang diperlukan untuk menyusun konstitusi, ia berpendapat bahwa buku itu penting. Tetapi karena pemerintah tidak punya banyak uang, maka sulit menyediakan perpustakaan, apalagi dalam empat bahasa. “Mereka yang duduk dalam Majelis semestinya memaksakan diri untuk menguasai empat bahasa tersebut. Mereka juga harus mencari jalan keluar, agar tidak menghambat proses penyusunan konstitusi,” katanya kepada **Danino da Cunha**. •

## • KONSTITUSI •

# Pelayanan Sosial

Sistem pelayanan sosial adalah fondasi kehidupan rakyat, karena itu harus dijamin dalam konstitusi. Khususnya, pendidikan dan kesehatan harus diberikan cuma-cuma agar rakyat bisa hidup sehat dan bebas dari kebodohan.

• • •

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kecerdasan umum, konstitusi perlu merumuskan peran dan tanggungjawab negara untuk membangun mekanisme yang menjamin peluang warganegara untuk maju dan menikmati hasil pembangunan. Ketentuan mengenai pembentukan sistem pelayanan sosial adalah fondasi, sehingga perlu ditetapkan dalam konstitusi. Mengingat pengalaman sejarah penderitaan yang begitu panjang, maka penyediaan sistem ini harus mendapat prioritas dan dijabarkan secara jelas dalam konstitusi.

Sistem ini bersifat menyeluruh, tidak diskriminatif, dan ditunjang oleh anggaran pemerintah. Seperti dikatakan oleh seorang peserta:

*Sistem pendidikan harus memberi kesempatan yang sama bagi setiap warganegara. Ini harus direalisasikan dalam suatu program pembangunan pemerintah sebagai prioritas utama, karena pendidikan adalah fondasi bangsa yang seharusnya diselenggarakan negara secara gratis kepada semua warganegara, terutama yang tidak mam-*

*pu.*

Dari dialog lain terungkap bahwa yang perlu dilakukan di Timor Lorosae sekarang bukan hanya pembangunan ulang atau rekonstruksi untuk mengembalikan Timor Lorosae ke bentuk semula, tetapi membangun bangsa dan masyarakat baru. Dan semua ini perlu dipertimbangkan dalam perumusan konstitusi. Peserta khususnya menekankan beberapa aspek dalam kaitan ini.

Sistem pelayanan pada dasarnya harus dapat menjawab pemenuhan kebutuhan dasar. Artinya ada fasilitas publik yang dibuat untuk keuntungan bersama, dan terutama mengembangkan kapasitas ekonomi rakyat. Seorang peserta mengatakan:

*Selaku rakyat biasa, menurut apa yang kami dengar, peraturan mengharuskan kita untuk membayar listrik, air, dan pajak bangunan. Namun yang perlu diingat, dari mana rakyat memperoleh uang untuk memenuhi tuntutan tersebut?*

Pendapat ini pada dasarnya adalah kritik tentang ketidakadilan dalam pelayanan publik, karena orang yang mampu mendapat subsidi untuk menikmati

(padahal mampu membayar lebih banyak), sementara rakyat tidak bisa menikmati sekalipun ikut membiayai secara tidak langsung melalui pajak.

Pendidikan juga mendapat sorotan penting, mengingat fungsi utamanya untuk meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan rakyat. Tuntutan utamanya agar sistem pelayanan yang dibentuk benar-benar dapat mewujudkan pendidikan gratis bagi seluruh warganegara. Seperti diungkapkan beberapa pendapat di bawah ini:

*Pada zaman Indonesia, untuk sekolah saja orang harus membayar dan kenyataan ini menyebabkan rakyat yang lemah ekonominya beban beratnya dalam menyekolahkan anak. Jadi dalam usia yang semakin dewasa bagi mereka yang tidak berpendidikan, baruskah pemerintah membiarkan hal itu?*

*... uang SPP sebaiknya ditiadakan karena pendidikan merupakan kewajiban negara kepada rakyat.*

*Saya ingin menanyakan mengapa harus ada sekolah swasta dan negeri, sedangkan pendidikan sendiri merupakan hak setiap warganegara yang semestinya diberikan secara gratis oleh pemerintah?*

Sistem ini hanya mungkin berjalan jika diisi oleh tenaga bermutu dan mendapat sarana kerja yang layak. Di samping itu, juga ada anjuran untuk mengaitkan sistem pendidikan ini dengan prinsip yang digariskan dalam sejarah perjuangan bangsa, yang berwatak anti-kolonial, anti-feodal, egaliter, dan

memberi kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan. Seorang peserta mengatakan:

*Usulan kami mengenai sistem pendidikan yang akan diatur dalam konstitusi itu adalah sistem pendidikan yang pernah diterapkan oleh salah seorang revolusioner kita, Vicente Sabe. Beliau menerapkan sistem atau metode partisipatif egaliter yang bersifat dua arah antara guru dan murid dan juga sebaliknya.*

Harapannya sistem pendidikan benar-benar dirombak sehingga berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan pendidikan yang pernah dipraktekkan kolonialisme Portugis maupun pendudukan militer Indonesia. Dalam membangun sistem pendidikan di kalangan peserta terdapat gambaran yang jelas. Rakyat punya pengalaman menyelenggarakan pendidikan sendiri, dan dalam proses perjuangan mengembangkan metode-metode yang ampuh untuk mengembangkan kesadaran politik, melakukan sosialisasi beberapa masalah dan menyampaikan informasi.

Begitu pula dalam hal kesehatan, yang merupakan kebutuhan dasar rakyat. Para peserta berharap sistem pelayanan sosial menjangkau bidang kesehatan, yang memberikan pelayanan gratis kepada rakyat dan penanganan khusus pada perempuan dan anak. Sistem kesehatan tidak dibayangkan sebagai rumahsakit dengan alat canggih, tetapi pengembangan sistem kesehatan yang menyeluruh, bukan hanya “mengobati yang sakit” tetapi “menjamin dan memelihara yang sehat.” •

# Menentukan Sistem Hukum Timor Lorosae

Sistem hukum apa yang harus dibangun di Timor Lorosae merdeka? Sistem apa pun, bagi rakyat, yang penting adalah kepastian hukum dan keadilan.

• • •

Dalam literatur hukum disebutkan bahwa sistem hukum itu terdiri dari sistem hukum adat, Anglo-Saxon, Eropa Kontinental, hukum Islam, dan lain-lain. Dari beberapa sistem hukum itu, ada tiga atau empat sistem hukum yang pernah dipraktekkan di Timor Lorosae. Hukum adat adalah yang pertama dikenal oleh masyarakat. Sistem hukum Eropa Kontinental, hukum Islam, dan lainnya, datang kemudian dibawa oleh bangsa Eropa dan Arab pada abad ke-15.

Dengan masuknya sistem hukum dari luar, hukum adat mulai dilemahkan kedudukannya dalam masyarakat. Pemerintah Portugis memaksa para *liurai* untuk menerima sistem hukum mereka, yang mereka anggap lebih sempurna. Karena sistem hukum mereka mengenal adanya kodifikasi hukum yang lebih menjamin adanya kepastian hukum. Menurut mereka, hukum adat tidak baik karena tidak ada kodifikasi

hukum sehingga sulit untuk mencapai kesatuan dan kesederhanaan hukum. Memang, hukum adat antara suku yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda.

Lemahnya peran hukum adat dalam masyarakat terus dirasakan ketika Timor Lorosae dikuasai oleh Indonesia. Selama 24 tahun terakhir, hukum adat sama sekali tidak diakui oleh pemerintah. Struktur hukum adat bahkan dengan sengaja dirusak sedemikian rupa sehingga di beberapa tempat, masyarakat tidak menghargainya lagi.

Dengan Regulasi No. 1/1999, UNTAET memberlakukan kembali hukum yang berlaku sebelum 25 Oktober 1999. Dengan demikian, diadopsi kembali sistem hukum Eropa Kontinental yang dipraktekkan penguasa Indonesia selama menduduki Timor Lorosae. Hukum Indonesia (kecuali yang bertentangan dengan ketentuan internasional hak asasi manusia) tersebut diberlakukan oleh UNTAET karena per-



AUGUSTO CASTRO

Para peserta Dialog Konstitusi Yayasan HAK dan Fokupers di Liquiça.

• • •

tama, untuk membuat suatu peraturan bukanlah perkara mudah dan membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit. Kedua, sumberdaya yang sekarang ada sebagian besar adalah lulusan berbagai perguruan tinggi Indonesia. Ketiga, tidak perlu lagi sosialisasi peraturan perundang-undangan, karena masyarakat pada umumnya sudah tahu.

Untuk masa sekarang dan yang akan datang, sistem hukum mana yang terbaik bagi Timor Lorosae? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memperhatikan komentar peserta, ketika Yayasan HAK dan Fokupers menyelenggarakan Dialog Konstitusi di 13 dis-

trik. Menurut para peserta, terlepas dari sistem hukum mana yang akan digunakan, yang penting adalah kepastian hukum dan keadilan. Kalau keduanya ada maka hak asasi setiap orang dapat dijamin, dan kesejahteraan pun dapat tercapai.

Selain itu, peserta pendidikan kewarganegaraan menekankan bahwa di dalam konstitusi yang akan datang harus muncul satu atau dua pasal yang lebih menekankan pada hukum adat. Artinya harus memberikan ruang atau kesempatan kepada hukum adat dan tokoh-tokoh adat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang rakyat hadapi tingkat basis. • Silverio Pinto Baptista

# Hukum Adat Dalam Konstitusi

Agar konstitusi menjadi "living law" (hukum yang hidup), hukum adat yang telah lama dikenal masyarakat, harus dijadikan bahan baku.

• • •

Hukum adat merupakan salah satu topik yang turut meramaikan Dialog Konstitusi yang diselenggarakan Yayasan HAK dan Fokupers. Dengan berbagai argumentasi, sejumlah peserta mengusulkan agar konstitusi Timor Lorosae memberi tempat kepada hukum adat. Usulan ini memang penting mengingat corak hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, diwariskan secara turun-temurun dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga secara keseluruhan mencerminkan budaya masyarakat kita. Karena harapan kita adalah memiliki sebuah konstitusi yang mencerminkan jati diri masyarakat, maka usulan tersebut penting dalam konteks pembuatan konstitusi saat ini.

Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang menjadi acuan wajib bagi penyusunan seluruh kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan suatu negara. Sosoknya adalah sebuah naskah dengan sederatan pasal yang memuat hal-hal penting dan

mendasar dari sejumlah aspek kehidupan bernegara, termasuk tradisi masyarakat. Banyak konstitusi yang mencerminkan aspek budaya dan tradisi masyarakat, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi Fiji, misalnya, memiliki beberapa pasal yang secara eksplisit bicara soal hukum adat. Misalnya tentang *Bose Levu Vakaturaga* (Dewan Besar Para Kepala Suku) dan ketentuan penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa.

Hukum adat merupakan salah satu bagian dari budaya suatu masyarakat. Ada yang mengartikan hukum adat sebagai keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat-istiadat masyarakat, bersifat tidak tertulis, dan masing-masing mencerminkan keragaman suku-bangsa yang mendiami suatu negeri. Dalam masyarakat Timor, terdapat beberapa aspek hukum adat, misalnya struktur pemerintahan tradisional, perkawinan, tanah, dan warisan. Dalam konteks ini, budaya juga meliputi tradisi-tradisi yang merupakan hasil adopsi unsur-unsur luar akibat interaksi



F.X. SUMARYONO

Kekayaan konsep hukum adat dapat memberi sumbangan konsepsional.

• • •

masyarakat dengan dunia luar dalam waktu yang amat lama. Meskipun telah terjadi banyak pergeseran sosial, tetapi eksistensinya masih cukup relevan bahkan masih memiliki unsur sakralitas daya ikatnya dalam kehidupan masyarakat, paling tidak di pedalaman. Ini merupakan aset dalam pembuatan bidang-bidang hukum tertentu.

Jika konstitusi dipandang sebagai fondasi untuk mengembangkan budaya masyarakat, maka pengakuan atas budaya masyarakat amat penting. Dengan demikian konstitusi mengokohnya dalam hukum negara, sehingga memiliki daya ikat. Dengan daya ikat konstitusional, maka pola kehidupan masyarakat yang telah mentradisi akan semakin memperoleh kekuatan hukum

yang tidak sebatas dipraktekkan secara ritual, melainkan dapat dipraktekkan kembali dan dikembangkan.

Dari aspek pembuatan hukum, kekayaan konsep hukum adat untuk bidang-bidang tertentu (pertanahan, perkawinan, pewarisan, adopsi, bagi hasil, dan sebagainya) dapat memberikan sumbangan konsepsional bagi penyusunan perangkat hukum untuk bidang-bidang tersebut. Dengan demikian, maka konstitusi dan perangkat hukumnya dapat mencerminkan hukum yang hidup dalam masyarakat, sebuah gagasan yang menghendaki agar sebuah produk hukum dibentuk berdasarkan konsep, tradisi, dan kebiasaan dalam masyarakat yang telah terlembagakan. •

Lito Exposto

# Lima Pasal Lingkungan Hidup

Fundação Haburas, sebuah organisasi lingkungan hidup Timor Lorosae, mengusulkan dimasukkannya lima pasal mengenai lingkungan hidup ke dalam konstitusi. Berikut ini usulan tersebut yang telah disunting oleh redaksi *Cidadaun*.

• • •

## Pasal 1

### Hak dan Kewajiban Lingkungan Hidup

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan ekologi yang seimbang, dan berkewajiban untuk melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup untuk kepentingan generasi mendatang.

2. Untuk menjamin adanya lingkungan hidup yang sehat dan ekologi yang seimbang adalah kewajiban negara, dengan pelibatan rakyat dan masyarakat lokal: (a) untuk melindungi, dan mengontrol dampak dari kerusakan hutan, erosi dan polusi; (b) untuk merencanakan dan mengembalikan sistem ekologi dan keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang; (c) untuk melangsungkan, memelihara dan melindungi sistem kehidupan areal konservasi darat dan laut yang sesuai dengan penggunaan sumberdaya alam oleh masyarakat adat; (d) untuk mempromosikan pendidikan dan penyadaran tentang lingkungan hidup; (e) untuk mengakui, menghargai dan memelihara hukum dan budaya tradisional yang menguntungkan lingkungan hidup; (f) untuk memastikan bahwa lingkungan hidup dimanfaatkan dan dikelola dengan cara ekologi yang berkelanjutan dan untuk keuntungan semua warganegara; dan (g) untuk memastikan bahwa pembangunan sosial dan ekonomi di Timor Lorosae terlaksana sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan ekologi yang berkelanjutan melalui: (i) persamaan antar generasi dan di dalam generasi; (ii) prinsip-prinsip kehati-hatian dini; (iii) konservasi keanekaragaman hayati; (iv) pencemar membayar.

## Pasal 2

### Hak Tradisional atas Tanah dan Sumberdaya Alam

1. Negara akan mengakui dan menghargai hak-hak tradisional untuk memiliki atau menggunakan tanah dan sumberdaya alam.

2. Negara tidak akan mengganggu atau mengizinkan gangguan terhadap hak-hak kepemilikan atau penggunaan tanah tradisional dan sumberdaya alam kecuali jika hal tersebut telah diberitahukan dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pemegang hak-hak tradisional tersebut.

## Pasal 3

### Hukum dan Budaya Tradisional

1. Setiap orang berhak untuk menjaga dan mengikuti hukum dan budaya tradisional, menyiapkan bahwa hukum dan budaya tradisional tersebut beserta hak-hak lainnya secara konsisten diatur dalam konstitusi ini.

2. Untuk menjamin hak untuk menjaga dan mengikuti hukum dan budaya tradisional: (a) negara akan mengakui, menghargai dan memelihara hukum dan budaya tradisional; (b) hukum tradisional akan berlaku jika seseorang terikat dengan

hukum adat tersebut.

## Pasal 4

### Kebebasan Informasi

Setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan pada semua informasi dan dokumen-dokumen yang dipegang oleh negara, kecuali dengan alasan keamanan negara yang akan diatur dengan regulasi.

## Pasal 5

### Pelaksanaan dan Pemaksaan Hak dan Kewajiban Negara

Setiap orang berhak masuk ke Pengadilan Tertinggi untuk mengajukan gugatan bahwa sebuah hak atau sebuah kewajiban negara yang tercantum dalam konstitusi ini, sedang dalam, atau terancam dilanggar atau berlawanan. Sewaktu gugatan dikabulkan, pengadilan tertinggi bisa memberikan biaya kompensasi yang wajar.

## Penjelasan dan Dasar Pikiran

### Pasal 1

#### Hak dan Kewajiban Lingkungan Hidup

*Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan ekologi yang seimbang.* Hak yang paling dasar dari hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Hak itu tidak bisa dinikmati penuh jika lingkungan hidup tidak sehat atau tidak seimbang.

(a) Hak untuk sebuah lingkungan hidup yang sehat akan memastikan rakyat tidak akan pernah dipaksa untuk hidup di dalam lingkungan hidup yang tercemar yang dapat membahayakan kesehatan atau memperpendek umur mereka.

(b) Hak untuk keseimbangan ekologi sangat penting karena sebagian besar rakyat Timor Lorosae masih sangat tinggi ketergantungannya pada lingkungan hidup lokalnya, baik untuk makanan dan mata pencaharian mereka.

Hak untuk sebuah lingkungan hidup yang bersih dan seimbang secara ekologi ditemukan pada konstitusi Brasil dan Portugal.

*Kewajiban individu untuk melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup untuk generasi mendatang.* Kemerdekaan dan mengatur diri sendiri bukan hanya berarti hak-hak baru, tetapi juga kewajiban baru. Jika setiap rakyat Timor Lorosae berhak atas sebuah lingkungan yang sehat dan seimbang secara ekologi, maka dia juga berkewajiban untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup tersebut. Kewajiban demikian dicantumkan dalam konstitusi India.

*Kewajiban negara untuk menghargai lingkungan hidup.* Untuk memastikan pelaksanaan dari hak atas sebuah lingkungan hidup yang sehat dan seimbang secara ekologi, negara Timor Lorosae harus menjadi subyek terhadap kewajiban-kewajiban lingkungan hidup secara khusus. Contoh dari kewajiban lingkungan hidup

ditemukan dalam konstitusi Srilanka dan Portugal.

Haburas membuat rancangan tujuh kewajiban negara. Kewajiban negara ini harus dilaksanakan melalui konsultasi dengan rakyat dan masyarakat lokal:

(a). Melindungi dan mengontrol dari kerusakan hutan, erosi, dan polusi.

(b). Merencanakan dan mengembangkan sistem ekologi dan keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang. Untuk itu aksi-aksi positif yang harus dilakukan adalah: (1) memperbaiki dan meregenerasi bagian-bagian lingkungan hidup yang telah rusak di masa kekuasaan asing; dan (2) melindungi bagian-bagian lingkungan hidup yang tersisa.

(c). Melangsungkan, memelihara dan melindungi sistem kehidupan areal konservasi darat dan laut yang sesuai dengan penggunaan sumberdaya alam oleh masyarakat tradisional;

(d). Mempromosikan pendidikan dan penyadaran tentang lingkungan hidup;

(e). Mengakui, menghargai, dan memelihara hukum dan budaya tradisional yang menguntungkan lingkungan hidup.

(f). Memastikan bahwa lingkungan hidup dimanfaatkan dan dikelola dengan jalan ekologi yang lestari dan untuk keuntungan semua warganegara.

(g). Memastikan bahwa pembangunan sosial dan ekonomi di Timor Lorosae terlaksana sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan ekologi yang berkelanjutan di bawah ini: (i) persamaan antar generasi dan di dalam generasi; (ii) prinsip-prinsip kehati-hatian dini; (iii) konservasi keanekaragaman hayati; dan (iv) pencemar membayar.

Kewajiban (f) dan (g) melingkupi isu pembangunan “berkelanjutan” – yang merupakan hal yang penting untuk dilakukan bersamaan dengan pembangunan aspek sosial dan ekonomi – yang merupakan hal yang sama pentingnya bahwa pembangunan ekonomi dan sosial dilakukan dalam sebuah keadaan ekologi yang berkelanjutan: (1) pembangunan ekologi berkelanjutan harus merupakan hasil luas dari keuntungan sosial dan ekonomi, termasuk juga keuntungan bagi lingkungan hidup; (2) pembangunan sosial dan ekonomi tergantung dari dasar-dasar sumberdaya alam yang sehat mengingat dasar sumberdaya alam Timor Lorosae telah terbatas; (3) jika pembangunan berfokus pada hasil ekonomi jangka pendek, maka hasilnya pada akhirnya merupakan beban berat pada biaya kerusakan jangka panjang yang ditanggung oleh lingkungan hidup.

Konsep pembangunan berkelanjutan ada di dalam konstitusi Panama.

## Pasal 2

### Hak-hak Tradisional Atas Tanah dan Sumber-sumber Daya Alam

Dari pandangan lingkungan hidup, pengakuan atas hak tanah tradisional (atau pemilihan tanah secara adat) adalah hal yang penting. Masyarakat lokal melihat tanah dan lingkungan hidup alami sebagai satu kesatuan. Mereka mempunyai hubungan yang erat dan secara spiritual dengan tanah dan lingkungan sekitar. Mereka juga sangat tergantung pada lingkungan hidup untuk mata pencaharian dan tempat yang berhubungan dengan kepercayaan dan kebudayaan tradisionalnya.

Sebagai titik awal, konstitusi harus mencantumkan pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak-hak tradision-

al atas tanah, baik hak kepemilikan maupun penggunaan. Misalnya, konstitusi Vanuatu mencantumkan: “Aturan aturan adat membentuk dasar-dasar kepemilikan dan penggunaan tanah ...”

Lebih khusus, negara tidak diperbolehkan mengganggu atau membiarkan terjadinya gangguan terhadap hak-hak tradisional atas tanah sebelum negara “mendapat izin terlebih dulu” dari pemiliknya. Hal ini berarti negara harus mengevaluasi potensi dampak terhadap hak tanah tradisional, menginformasikan kepada pemiliknya tentang potensi dampak tersebut, kemudian mendapatkan persetujuan dari pemiliknya pada *usulan gangguan* tersebut.

## Pasal 3

### Hukum dan Budaya Tradisional

Hukum dan budaya tradisional Timor Lorosae terbukti cukup kuat untuk bertahan selama berabad-abad kolonialisme. Hukum dan budaya tradisional bisa memainkan peranan penting pada masa mendatang dengan menyediakan kestabilan dan aturan di dalam masyarakat lokal, terutama ketika negara tidak mempunyai sumberdaya untuk melaksanakan hukum nasional.

Hukum dan budaya tradisional Timor Lorosae memerlukan pengakuan dan perlindungan formal dalam konstitusi nasional. Dalam Konstitusi Filipina 1986 (pasal 17) disebutkan:

*“Negara harus mengakui, menghargai, dan melindungi hak-hak dari budaya masyarakat asli untuk menjaga dan mengembangkan budaya, tradisi dan lembaga mereka. Akan mempertimbangkan hak-hak ini dalam formula perencanaan dan kebijakan nasional”.*

Konstitusi bisa mengharuskan perkara kriminal dan konflik untuk diselesaikan secara hukum tradisional bagi mereka yang memilih terikat dengan hukum tradisional. Karena hukum tradisional secara umum lebih murah dan efektif daripada hukum nasional.

Dalam beberapa kasus hukum dan budaya tradisional bisa bersifat represif, misalnya terhadap perempuan, atau menerapkan sanksi yang sangat keras dan kejam (misalnya, hukum cambuk). Karena itu, hukum dan budaya tradisional harus tidak berlawanan dengan hak-hak lain yang tercantum dalam konstitusi.

## Pasal 4

### Kebebasan Atas Informasi

Konstitusi harus mencantumkan hak untuk mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi dan dokumen-dokumen negara. Kecuali informasi yang menyangkut keamanan nasional, dan untuk itu perlu dijelaskan dengan regulasi.

## Pasal 5

### Keharusan Negara untuk Melaksanakan Hak dan Kewajiban yang Tercantum dalam Konstitusi

Sangat penting bahwa setiap pasal tentang lingkungan hidup yang tercantum dalam konstitusi harus dapat dipaksakan secara hukum.

Pemaksaan secara hukum harus dijamin dengan mencantumkan hak-hak khusus untuk membawa ke pengadilan (untuk mendapatkan pemulihan yang wajar) jika ada hak atau kewajiban negara yang tercantum dalam undang-undang, telah, sedang, atau terancam dilanggar atau ada tindakan yang berlawanan dengannya. Konstitusi Chile mencantumkan ketentuan seperti itu. ●

# Mari Membahas Rancangan Konstitusi

F.X. SUMARYONO

Fraksi-fraksi di Majelis Konstituante telah menyerahkan rancangan konstitusi mereka. Mintalah rancangan tersebut dan diskusikan serta buatlah kritik dan saran.

• • •

Setelah menjalani sidang dengan debat-debat yang cukup melelahkan, Majelis Konstituante meneguhkan Ketentuan Tata-Tertib yang mengatur seluk-beluk kerja badan pembuat konstitusi ini. Sidang-sidang selanjutnya adalah membahas mengenai konstitusi itu sendiri. Tahap ini dimulai dengan penyerahan rancangan konstitusi oleh fraksi-fraksi (*bancadas*) yang memang sudah memiliki rancangan tersebut, yaitu ASDT, FRETILIN, KOTA, PD, PNT, PPT, PSD, PPT, dan UDT.

Konstitusi sangat penting bagi seluruh rakyat karena konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur seluruh kehidupan kita sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Perekonomian, yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan hidup material maupun spiritual kita akan ditentukan oleh apakah investasi asing boleh bebas memasuki seluruh sektor perekonomian ataukah hanya sektor tertentu saja. Kesehatan yang sa-

ngat menentukan kualitas hidup pribadi-pribadi rakyat, akan sangat ditentukan oleh apakah bidang ini oleh konstitusi dinyatakan sebagai kewajiban negara yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberi tempat kepada lembaga-lembaga amal (termasuk yang dijalankan oleh lembaga keagamaan) ataukah boleh dimasuki oleh swasta sebagai salah satu kegiatan bisnis, yang dengan demikian menjadikan pelayanan dasar ini sebagai salah satu sektor kegiatan komersial.

Mengingat pentingnya konstitusi, maka sebagai rakyat, kita harus melibatkan diri secara konstruktif dalam proses penyusunan konstitusi sekarang ini. Salah satu langkah yang bisa kita tempuh adalah meminta rancangan konstitusi dari partai-partai politik. Setelah rancangan tersebut didapatkan, Anda bisa membahasnya bersama teman-teman kerja. Misalnya Anda bekerja sebagai buruh pelabuhan, Anda bisa berdiskusi



Bancada PD di Majelis Konstituante.

• • •

dengan sesama buruh pelabuhan mengenai jaminan perlindungan dan pemajuan hak kaum buruh dalam konstitusi serta apa usulan para peserta diskusi mengenai hal ini. Anda juga bisa menyoroti apakah sistem pemerintahan yang disebutkan dalam rancangan sudah sesuai dengan asas demokrasi dan akan bisa mengembangkan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara

Rancangan konstitusi bisa pula Anda diskusikan bersama teman-teman sesama anggota organisasi yang Anda ikuti. Misalnya Anda anggota organisasi perempuan, Anda bisa mendiskusikan apakah rancangan tersebut memuat jaminan perlindungan dan pemajuan hak

perempuan.

Bagus juga kalau Anda mengadakan diskusi di tingkat *aldeia*. Anda bisa mendiskusikan mengenai apakah rancangan konstitusi yang Anda dapatkan akan melahirkan kebijakan pemerintah bisa yang mengembangkan pertanian dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi penduduk di *aldeia* Anda, seperti tidak adanya transportasi, saluran informasi, dan pelayanan air bersih.

Karena itu, mintalah rancangan konstitusi partai-partai politik. Setelah Anda membaca dan mendiskusikannya, tuliskan saran-saran untuk perbaikan dan kirimkan partai bersangkutan dan/atau kepada Majelis Konstituante. •

## • PROFIL •

### Armando da Silva

Dari Penyiar Radio ke Majelis Konstituante.

Armando José Doudaro da Silva adalah anak kedua dari enam bersaudara, pasangan José da Silva (alm.) dan Rosa Maria Doudaro (alm.). Armando yang biasa disapa Dino ini lahir di Dili, 19 September 1967. Dino menyelesaikan sekolah di SD 1 Dili, SMP 3, dan SMA 1. Ia kemudian melanjutkan ke Universitas Timor Timur, jurusan Administrasi Negara. "Saya berhenti kuliah pada 1990 dan pada 20 April bersama kawan-kawan mendirikan organisasi Fitun," katanya.

Pada 20 Agustus 1990 bertepatan dengan peringatan ulangtahun FALINTIL mereka diundang Xanana Gusmão ke wilayah Surulau, Ainaro. Sekaligus Xanana Gusmão meresmikan Fitun. "Sekembalinya dari hutan saya menyebarkan organisasi Fitun ke-13 distrik dan akhirnya diakui oleh CNRT," kata Dino di Gedung Majelis. Ia mengaku berhenti kuliah? Menurutnya, tim Satuan Gabungan Intelijen kemudian tahu apa yang dikerjakannya. "Saya mencari akal, bagaimana orang tidak tahu tentang Fitun. Karena itu saya mulai mencari pekerjaan," katanya. Berbekal bakatnya ia akhirnya bekerja di Radio Republik Indonesia (RRI) siaran FM pada 1990-1995. Ia pun sempat mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan kepenyiaran di RRI Jakarta.



F.X. SUMARYONO

Ia juga pernah menjadi juara Bintang Televisi dan mengikuti lomba melukis. "Pada 1990 saya dipercaya Xanana Gusmão untuk melukis bendera FALINTIL yang akhirnya digunakan sebagai bendera CNRT yang dikenal di seluruh dunia," kata lajang ini dengan bangga.

Bekas presiden Fitun ini pernah mencetak sekitar enam atau tujuh album musik. Tahun 1985 Dino mulai rekaman di Atika Record dan berhenti ketika ia terjun ke dunia politik. Masih ingin menyanyi? "Kalau kita sudah menjiwai tentu sulit sekali untuk melepaskannya, ya. Mungkin nanti." Soal kegiatannya melukis, ia mengumpulkan sejumlah temannya yang punya bakat melukis di Sede Partai Liberal. "Saya mengajar disana karena saya ingin agar mereka mengembangkan bakatnya." • Nina Marques

Perempuan berusia 39 tahun ini adalah anggota Majelis Konstituante wakil Distrik Dili dari FRETILIN. Dilahirkan di Laga, 27 Juni 1963 dari pasangan Mateus da Costa Pereira dan Isabel de Sousa Gama. Anak kedua dari tujuh bersaudara ini menikah dengan seorang guru SD bernama Luis Serano Pereira dan dikarunia empat orang anak. "Suami saya hilang setelah Jajak Pendapat dua tahun lalu, akibat keganasan milisi dan militer Indonesia. Sampai saat ini kami belum tahu keberadaannya," katanya, dengan mata berkaca-kaca. Sementara tiga saudaranya tewas di Gunung Matebian saat invasi militer Indonesia.

Ia mulai terlibat dalam FRETILIN sejak berusia 12 tahun, melalui keterlibatannya dalam Organização Popular de Juventude de Timor (OPJT) di Zona 11 Setembro, Laga. Setelah invasi militer Indonesia, ia bergerilya di hutan bersama Xanana Gusmão di Gunung Matebian dan Boilo selama tiga tahun. Ketika semua *Base de Apoio* hancur, ia kembali ke kota pada 2 Maret 1979. Kemudian melanjutkan sekolah pada tingkat SDK kelas 6 Laga, karena pada masa kolonial Portugis dia menyelesaikan Quarta Classe dan SMPN di Laga. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di SMAK Kristal Dili. Di samping sekolah dia harus bekerja untuk membiayai keluarganya dengan bekerja di Kejaksaan Dili, kemudian dia-

### Cipriana Pereira

Diutus ke luar negeri untuk pemberantasan korupsi.

Perempuan berusia 39 tahun ini adalah anggota Majelis Konstituante wakil Distrik Dili dari FRETILIN. Dilahirkan di Laga, 27 Juni 1963 dari pasangan Mateus da Costa Pereira dan Isabel de Sousa Gama. Anak kedua dari tujuh bersaudara ini menikah dengan seorang guru SD bernama Luis Serano Pereira dan dikarunia empat orang anak. "Suami saya hilang setelah Jajak Pendapat dua tahun lalu, akibat keganasan milisi dan militer Indonesia. Sampai saat ini kami belum tahu keberadaannya," katanya, dengan mata berkaca-kaca. Sementara tiga saudaranya tewas di Gunung Matebian saat invasi militer Indonesia.

Ia mulai terlibat dalam FRETILIN sejak berusia 12 tahun, melalui keterlibatannya dalam Organização Popular de Juventude de Timor (OPJT) di Zona 11 Setembro, Laga. Setelah invasi militer Indonesia, ia bergerilya di hutan bersama Xanana Gusmão di Gunung Matebian dan Boilo selama tiga tahun. Ketika semua *Base de Apoio* hancur, ia kembali ke kota pada 2 Maret 1979. Kemudian melanjutkan sekolah pada tingkat SDK kelas 6 Laga, karena pada masa kolonial Portugis dia menyelesaikan Quarta Classe dan SMPN di Laga. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di SMAK Kristal Dili. Di samping sekolah dia harus bekerja untuk membiayai keluarganya dengan bekerja di Kejaksaan Dili, kemudian dia-



F.X. SUMARYONO

lihat ke Biro Kepegawaian Pemda Timor Timur. Kendati begitu, ia menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana ilmu pemerintahan di Universitas Timor Timur pada 1998. Di kampus ia aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan pernah menjadi sekretaris Ikatan Mahasiswa Laga. Dalam perlawanan, ia aktif di OPMT, Frente Política Interna CNRT, dan menjadi wakil koordinator komisi yuridis distrik Dili.

Pada pertengahan Oktober ini, ia dan Leandro Isac diutus Majelis Konstituante untuk pergi ke Australia dan Papua Niugini mengikuti konferensi mengenai pemberantasan korupsi. •

Rogério Soares